



**KESEHATAN MASYARAKAT**

## Pemkot Siap Tanggung Premi Jaminan Kesehatan

JOGJA—Pemkot Jogja menyiapkan anggaran sebesar Rp24,8 miliar guna menanggung biaya premi jaminan kesehatan masyarakat untuk kategori kelas III. Namun hingga kini pendaftaran peserta program tersebut belum dibuka lantaran masih menunggu surat edaran resmi dari Wali Kota Jogja.

Wakil Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jogja Agus Sudrajat mengatakan saat ini banyak muncul pesan berantai terkait dengan pendaftaran sebagai peserta jaminan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan yang dibiayai oleh APBD Kota Jogja.

Dia mengaku ada yang perlu diklarifikasi dari pesan tersebut, yakni terkait dengan pendaftaran. "Jadi memang belum kami buka pendaftaran itu [sebagai peserta BPJS Kesehatan yang preminya dibiayai APBD Jogja]," kata dia saat menggelar jumpa pers di Balai Kota Jogja, Kamis (22/11).

● Lebih Lengkap Halaman 16

**PEMKOT SIAP TANGGUNG PREMI JAMINAN KESEHATAN**

- Total Cakupan Peserta JKN/KIS Jogja **395.079 jiwa (96,4%)**
- Total Penduduk Jogja **410.921 jiwa.**
- Alokasi Anggaran untuk Penanggunggaran Premi Jaminan Kesehatan Pemkot Jogja  
**2017 : Rp20 miliar.**  
**2018 : Rp24,8 miliar.**
- Alokasi Jumlah Penerima Tanggungan Premi Jaminan Kesehatan Pemkot Jogja  
**2017 : Sekitar 46.000 orang.**  
**2018 : Sekitar 82.000 orang**

sumber: wawancara (har)

---

### Pemkot Siap...

Dia mengatakan program pembiayaan premi BPJS Kesehatan itu pada dasarnya terbuka bagi seluruh warga Jogja. Akan tetapi memang ada beberapa kriteria yang jadi syaratnya.

Di antaranya adalah warga Jogja yang dibuktikan oleh e-KTP, Kartu Identitas Anak, maupun Kartu Keluarga terbitan Pemkot Jogja. Selain itu calon peserta juga harus belum tercatat sebagai peserta JKN/KIS yang ditetapkan oleh Pusat. "Peserta program nantinya harus bersedia berobat ke puskesmas dan rumah sakit kelas III di Jogja yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan," ucap Agus.

Dia juga menegaskan program tersebut tidak berlaku jika peserta program meninggal dunia, atau layanannya naik kelas dari kelas tiga ke atasnya.

"Karena kalau sampai naik kelas, itu tandanya yang bersangkutan sudah masuk kategori mampu," ujar dia.

Tak hanya itu, program tersebut juga tidak berlaku jika si penerima manfaat menjadi peserta mandiri atau penerima upah iuran; berpindah kependudukan; dan terdaftar lebih dari satu kepesertaan.

"Kalau masuk kriteria, silakan mendaftar. Perlu diingat, kalau sudah menjadi peserta program ini, mereka tidak boleh berpindah program hingga minimal enam bulan. Kecuali jika dia terdaftar sebagai peserta penerima upah karena dianggap mampu," kata dia.

Kriteria lain yang bisa mendaftar untuk program ini, lanjut Agus adalah warga Jogja yang menjadi peserta kelas III dan pernah menunggak iuran; atau peserta kelas I dan II yang pernah menunggak iuran selama satu tahun dan berniat turun kelas jadi peserta kelas III.

"Atau peserta kelas I dan II yang menunggak kurang dari setahun, atas permintaan sendiri ingin menjadi peserta program Pemkot itu. Syaratnya tinggal bawa KK, KTP, KIA yang asli dan fotokopi serta menandatangani surat pernyataan bermaterai untuk tidak naik kelas pelayanan," ucap Agus.

Pendaftarannya itu pun, kata dia, hanya bisa dilakukan di Pemkot atau Kantor BPJS Kesehatan. Pemkot bisa mengurangi atau menambahkan alokasi jumlah peserta program sesuai dengan kebutuhan anggaran.

Pasalnya hingga kini masih ada sekitar 15.000 warga Jogja yang belum tertanggung oleh jaminan kesehatan. "Kalau nanti [anggaran] tidak cukup, maka pendaftar masuk dalam daftar tunggu [waiting list]. Kapan pendaftaran, dimulai? Tunggu surat edaran," ucap Agus.

Kasi Penjaminan dan Peningkatan Mutu Dinkes Jogja Umi Nur Chariaty mengatakan hingga kini *coverage* penduduk kota yang menjadi peserta BPJS Kesehatan tercatat sebesar 95% dari jumlah penduduk yang totalnya mencapai sekitar 440.000. Tahun lalu, alokasi anggaran untuk Jamkesda sebelum terintegrasi dengan layanan BPJS Kesehatan sekitar Rp20 miliar. "Tahun depan alokasi yang kami sedakan sebesar Rp24,8 miliar. Adapun calon penerima manfaat program naik dua kali lipat, dari sekitar 46.000 orang menjadi 82.000 orang." (Abdul Hamid Razak)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005